

KRISIS KEPEMIMPINAN KIAI

Studi atas Kharisma Kiai dalam Masyarakat

*Edi Susanto**

Abstract: *in the hierarchy of a traditional society, Kiai is considered to belong to both social and religious elite. He therefore holds an important role in his society. However, with the expansion of modernity that gives birth to a progressive and dynamic change in our society, Kiai is not regarded any more as the sole agent of social change. His function is becoming less and limited vis-à-vis modernity. The nature of his leadership is no longer religious, paternalistic and charismatic. Hence, Kiai should adapt himself to modernity and change the style of his leadership to become more persuasive, participative, and rational if he is to survive.*

Keywords: *kiai, charisma, religio-paternalistic.*

Pendahuluan

Gambaran klasik William Shakspeare tentang dunia sebagai suatu panggung yang menekankan berbagai perubahan dalam peran dan kedudukan (status) yang muncul seiring dengan bergulirnya waktu¹, kiranya tepat digunakan dalam meneropong kepemimpinan kiai. Dalam konteks ini, kiai merupakan status² yang dihormati dengan segudang peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Ketokohan dan kepemimpinan kiai sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadiannya dalam memimpin pesantren dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kiai dapat membangun peran strategisnya sebagai pemimpin masyarakat non formal melalui suatu komunikasi intensif dengan masyarakat. Kedudukannya yang penting di lingkungan pedesaan sama sekali bukan hal baru, tetapi justru sejak masa kolonial, bahkan jauh sebelum itu, tampak lebih menonjol dibandingkan dengan masa sekarang yang mulai memudar.³

Pesantren, khususnya di Jawa dan Madura, pernah menduduki posisi strategis dalam perspektif masyarakat⁴. Pesantren waktu itu mendapatkan pengaruh dan penghargaan besar karena kemampuannya dalam mempengaruhi masyarakat. Dalam perkembangannya, keperksaan pesantren dimitoskan karena adanya kharisma kiai dan dukungan besar para santri

* STAIN Pamekasan, Jl. Pahlawan km. 4 Pamekasan, telepon: 085230028648.

¹ Paul B. Horton Chester L. Hunt, *Sosiologi*. Ter. Aminuddin Ram, Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1999), 118.

² "Status/kedudukan" acapkali didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu peran.

³ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam perubahan Sosial* (Jakarta: P3M., 1986), 138.

⁴ Posisi strategis pesantren tidak dapat dilepaskan dari peranan kyai (ulama) pengasuhnya. Posisi ulama dalam Islam sangatlah penting, yakni sebagai penerus risalah Nabi. Sejak masa-masa awal kerajaan Islam di Jawa, tampak para ulama memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Menurut Harry Julian Benda dalam bukunya *the Crescent and the Rising Sun*—sebagaimana dikutip Pradjarta Dirdjosanjoto—para penguasa yang baru dinobatkan harus banyak bersandar pada para ulama, guru mistik dan ahli kitab—yang rata-rata mereka semua diidentifikasi sebagai kyai—karena merekalah yang dapat menobatkan para penguasa tersebut menjadi pangeran-pangeran Islam, mengajar serta memimpin upacara-upacara keagamaan serta menjalankan hukum Islam terutama di bidang perkawinan, perceraian serta warisan. Periksa Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 35.

yang tersebar di masyarakat.⁵

Kiai dengan kharismanya dijadikan imam dalam bidang *'ubudiyah*, upacara keagamaan dan sering diminta kehadirannya untuk menyelesaikan problem yang menimpa masyarakat. Rutinitas ini semakin memperkuat peran kiai dalam masyarakat, sebab kehadirannya diyakini membawa berkah⁶. Sebagai implikasi dari peran yang dimainkan kiai ini, kedudukan pesantren menjadi multi fungsi.

Kharisma kiai memperoleh dukungan masyarakat, hingga batas tertentu, disebabkan karena dia dipandang memiliki kemantapan moral dan kualitas keimanan yang melahirkan suatu bentuk kepribadian magnetis bagi para pengikutnya. Proses ini, mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, sekitar kediamannya, yang kemudian menjalar ke luar ke tempat-tempat yang jauh⁷. Kharisma yang dimiliki kiai tersebut dalam sejarahnya mampu menjadi sumber dan inspirasi perubahan dalam masyarakat.

Kiai dengan kharisma yang dimilikinya tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama, tetapi juga sebagai elit pesantren dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan Islam serta berkompeten dalam mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan terutama dalam pesantren. Tipe kharismatik yang melekat pada dirinya menjadi tolok ukur kewibawaan pesantren. Dilihat dari segi kehidupan santri, kharisma kiai merupakan karunia yang diperoleh dari kekuatan dan anugerah Tuhan.⁸

Dari deskripsi tersebut, memunculkan beragam pertanyaan. Dalam konteks kekinian, apakah kharisma kiai masih mampu menjadi sumber perubahan sosial? apakah pesan dan pandangannya senantiasa diresponsi masyarakat kita, yang kini, cenderung bergerak ke arah modernitas, meski pun masih dalam taraf proses atau masa transisi.⁹

Oleh karena proses tersebut menjadi milik masyarakat, maka eksistensi pondok pesantren sebagai bagian dari masyarakat tidak lagi sentral. Kedudukan kiai mengalami differensiasi dan tidak lagi menjadi tempat bertumpu, seperti layaknya tempo dulu. Demikian juga kharisma yang pada awalnya bertumpu pada kiai, kini telah dikoyak oleh dinamika perkembangan rasionalitas masyarakat.

Tulisan ini, hingga batas tertentu berusaha mengidentifikasi sebab-sebab memudarnya kharisma kiai sebagai salah satu sumber perubahan sosial.

Kiai, Kepemimpinan dan Kharisma

Kajian tentang kiai, mesti mengikutsertakan kajian tentang kepemimpinan, dan mengkaji tentang kepemimpinan, tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang kharisma. Ketiga hal tersebut—kiai, kepemimpinan dan kharisma—menjadi suatu bagian integral yang tidak dapat dipisahkan,

⁵ Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai Sub-Kultur", dalam M. Dawam Rahardjo, ed. *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1988), 54-55. Periksa juga Kuntowijoyo, "Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa: Potret Sebuah Dinamika", dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), 246-264.

⁶ Misalnya, tidak jarang kyai diminta mengobati orang sakit, memberikan ceramah agama dan diminta do'a untuk melariskan barang dagangan. Periksa Sukamto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3ES., 1999), 13.

⁷ Dapat dilihat misalnya Kharisma KH. Hasyim Asy'ari di Jombang, KH. Wahab Chasbullah, KH. Kholil Bangkalan dan KHR. As'ad Syamsul Arifin dari Sitobondo dan beberapa kyai lainnya terutama mereka yang berafiliasi pada NU.

⁸ Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*. Ter. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali, 1984), 168-169. lihat juga Benedict ROG Anderson, *Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa* ter. Ali As'ad. (Semarang: Menara Kudus, 1972), 32-33.

⁹ Modernisasi ditandai dengan diperlukannya tenaga-tenaga profesional dalam setiap pekerjaan, pola kehidupan konsumtif yang semakin tinggi, kompetisi di berbagai bidang yang semakin ketat dan konsep masyarakat individualistik yang semakin mencolok. Periksa Sudjito S., *Transformasi Sosial menuju Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 1-15.

sebab di dalamnya terkandung status dan peran yang dimainkan oleh seseorang dengan predikat yang disandangnya dalam suatu masyarakat.

Istilah kiai dalam bahasa Jawa mempunyai pengertian yang luas. Ia berarti mencirikan baik benda maupun manusia yang diukur dalam sifat-sifatnya yang istimewa, dan karenanya, sangat dihormati. Misalnya dikatakan sakti bila sang empu sanggup memasukkan kesaktian pada keris buatannya. Keris-keris semacam itu dijuluki atau diberikan predikat kiai.¹⁰ Senjata dan benda-benda keramat yang berkekuatan gaib ini selalu dipuja dan diwarisi sebagai sumber kekuatan gaib (pusaka). Bahkan turun dan lenyapnya kekuasaan sosial politik selalu diterangkan dengan hilangnya pusaka atau karena mengabaikan upacara-upacara yang diperlukan untuk memelihara kesaktian tersebut¹¹.

Di samping dipredikatkan kepada senjata dan benda pusaka, dalam konteks kebudayaan Jawa, gelar kiai juga diberikan kepada laki-laki yang berusia lanjut, arif dan dihormati. Bahkan dalam persebaran agama Kristen, sebutan kiai juga dipakai untuk beberapa pengkabar Injil pribumi, guna membedakannya dengan pengkabar Injil Barat.¹² Namun pengertian kiai dalam konteks Indonesia modern telah mengalami transformasi makna, yakni diberikan kepada pendiri dan pemimpin sebuah pondok pesantren yang membaktikan hidupnya demi Allah serta menyebarkan dan memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan.¹³

Oleh karenanya, predikat kiai senantiasa berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan kemuliaan dan pengakuan yang diberikan secara sukarela kepada ulama, pemimpin masyarakat setempat sebagai sebuah tanda kehormatan bagi kehidupan sosial dan bukan merupakan suatu gelar akademik yang diperoleh melalui pendidikan formal.¹⁴

Dengan pengertian tersebut, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud kiai dalam kajian ini adalah pemimpin (ulama) Islam yang dipandang masyarakat mempunyai kharisma, baik sebagai pemimpin pesantren atau bukan sebagai pemimpin pesantren¹⁵.

Kemudian, fungsi kepemimpinan yang diidealisasikan sebagai peran yang melekat pada status kekiaian merupakan suatu peran yang mesti dipandang signifikan, sebab kepemimpinan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya seorang kiai dalam memimpin masyarakatnya, lebih spesifik lagi pada lembaga yang dipimpinnya,

¹⁰ Ziemek, *Pesantren*, 131. Bandingkan Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

¹¹ Moebirman, *Keris and Other Weapons of Indonesia* (Jakarta: Martinus Nitjhof, 1970), 34.

¹² Periksa catatan kaki no 1 pada Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat*, 20.

¹³ Kadar semantik dari istilah kyai di sini mencakup secara mutlak komponen tradisional Jawa, termasuk juga pemimpin pesantren. Gelar tersebut berada dalam kesinambungan tradisional dan mencakup arti sebagai sebuah dimensi kerohanian masyarakat yang memiliki suatu kesaktian, misalnya sebagai dukun atau ahli kebatinan dan guru maupun pemimpin di daerah yang berwibawa, yang memiliki legitimasi atas wewenangnya berdasarkan kepercayaan penduduk.

¹⁴ Ziemek, *Pesantren*, 131. Dalam konteks ini perlu dikemukakan bahwa kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam, yang dalam kepustakaan Barat, perbedaan antara dua jenis keahlian ini telah menjadi kabur dan penggunaannya sering tertukarkan, padahal keduanya sesungguhnya berbeda, dimana letak perbedaannya berkisar pada status dan pengaruh. Dalam pandangan masyarakat Jawa dan Madura, posisi kyai lebih tinggi dari pada ulama. Seorang ulama dengan seluruh persyaratan yang diperlukan pada suatu waktu mungkin berhasil meningkat ke posisi kyai. Periksa Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*. Ter. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M., 1987), 1-3.

¹⁵ Memang tidak semua kyai memiliki pondok pesantren. Terdapat pula kyai yang mengajarkan agama dengan cara berceramah dari desa ke desa, menyampaikan fatwa kepada masyarakat luas. Terhadap kyai jenis ini, dijuluki sebagai *kyai Teko* atau *kendi*. Para kyai penceramah ini diibaratkan sebuah *teko* yang berisi air, yang senantiasa memberikannya kepada setiap orang yang memerlukan air. Sedangkan julukan kepada kyai yang memiliki pesantren disebut dengan kyai sumur. Periksa Sukamto, *Kepemimpinan Kiai*, 85-86.

pesantren. Tegasnya kepemimpinan merupakan faktor penting yang patut dipertimbangkan¹⁶

Proses berlangsungnya kepemimpinan akan melahirkan seorang tokoh yang disebut sebagai pemimpin. Sebutan ini lahir ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas dan memiliki kecakapan tertentu yang jarang didapat oleh orang lain. Apabila karakteristik tersebut dikaitkan dengan aktivitas memobilisasi massa, maka lahirlah pemimpin massa (populis), apabila dikaitkan dengan organisasi kedinasan pemerintah, maka disebutlah jabatan pimpinan. Jika dikaitkan dengan bidang administrasi, maka disebutlah administrator. Begitu pula akan muncul sebutan *murshid* jika dihubungkan dengan organisasi tarekat, dan sebutan kiai jika dikaitkan dengan pondok pesantren, sekalipun tidak semua kiai memimpin pondok pesantren¹⁷.

Semua jenis pemimpin tersebut melakukan fungsi kepemimpinannya sesuai dengan bidang garapannya, dan bidang garapan inilah yang acapkali membedakan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, kepemimpinan dalam suatu organisasi atau lembaga mempunyai peranan yang sangat vital. Model kepemimpinan yang diterapkan sangat menentukan intensitas keterlibatan anggotanya dalam rencana aktivitas organisasi. Namun demikian, faktor kepemimpinan masih tetap merupakan faktor penentu terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan suatu organisasi, sehingga tidak salah jika dinyatakan bahwa kepemimpinan adalah soal penilaian masyarakat terhadap pribadi seseorang dalam kaitannya dengan sistem sosial yang berlaku. Hubungan yang melekat antara unsur pribadi dengan sistem sosial ini adalah faktor utama yang mematangkan kepemimpinan tersebut. Ini berarti bahwa selama pribadi yang disebut pemimpin dianggap atau dinilai –oleh masyarakat pengikutnya—telah memenuhi kebutuhan dari sistem sosial dan komunitas pendukungnya, maka selama itu pula ia dapat mempertahankan ikatan emosional di antara para pengikutnya, dan selama itu pula kepemimpinannya tetap berlanjut.¹⁸

Kepemimpinan kiai, sering diidentikkan dengan atribut kepemimpinan kharismatik. Dalam konteks tersebut, Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa kiai-kiai pondok pesantren, dulu dan sekarang, merupakan sosok penting yang dapat membentuk kehidupan sosial, kultural dan keagamaan warga muslim di Indonesia¹⁹. Pengaruh kiai terhadap kehidupan santri tidak terbatas pada saat santri masih berada di pondok pesantren, akan tetapi berlaku dalam kurun waktu panjang, bahkan sepanjang hidupnya, ketika sudah terjun di tengah masyarakat.

Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, kepemimpinan merupakan masalah yang menjadi fokus kajian.²⁰ Pemimpin akan selalu lahir, baik dalam komunitas kecil maupun besar. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu kelompok masyarakat tanpa kehadiran seorang pemimpin, selama masih ada pihak-pihak yang dipengaruhi dan diarahkan. Biasanya pihak yang berpengaruh merupakan kelompok minoritas tetapi posisinya sangat dominan, sedangkan yang dipengaruhi posisinya subordinat dan berjumlah besar, sehingga, dengan demikian, konsep

¹⁶ Tanpa pemimpin yang baik, maka roda organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Meski demikian, penulis tidak menafikan unsur lain yang dapat menopang ketercapaian tujuan organisasi, yakni sumber permodalan yang cukup, struktur organisasi yang tepat dan tersedianya *human resources* yang handal.

¹⁷ Sukamto, *Kepemimpinan Kyai*, 19.

¹⁸ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES., 1987), 64.

¹⁹ Sartono Kartodirjo, *Religious Movement of Java in the 19th and 20th Centuries* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1970), 114.

²⁰ Dalam konteks masyarakat paguyuban, terutama di pedesaan, terdapat pepatah yang sangat layak ditampilkan yakni *jika gajah dengan gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengahnya*. Seekor gajah ibarat sosok pemimpin, apabila sekelompok pemimpin memutuskan untuk berperang karena konflik berkepanjangan, maka seluruh umat manusia sebagai *pelanduknya* akan mati di tengah medan peperangan. Ungkapan ini sekedar untuk memberikan aksentuasi bahwa kekuatan penggerak utama masyarakat terletak kepada pemimpinnya

kepemimpinan tidak terlepas dari aspek sosial, budaya dan politik.²¹

Mendefinisikan kepemimpinan sebagai usaha untuk mengarahkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan²², mempunyai makna bahwa pemimpin memerankan fungsi penting sebagai pelopor dalam menetapkan struktur, keadaan, ideologi dan kegiatan kelompoknya. Sehubungan dengan ini, terdapat tiga perspektif dalam memahami fenomena kepemimpinan. *Pertama*, kepemimpinan dapat dipandang sebagai kemampuan yang ada dalam diri individu. Hal ini berarti aspek tertentu dari seseorang telah memberikan suatu penampilan berkuasa dan menyebabkan orang lain menerima perintahnya sebagai sesuatu yang mesti diikuti. Ia diyakini memperoleh bimbingan “wahyu”, memiliki kualitas yang dipandang sakral dan menghimpun massa dari masyarakat kebanyakan. Dalam perspektif Max Weber, kepemimpinan yang bersumber dari kekuasaan luar biasa disebut kepemimpinan kharismatik atau *charismatic authority*²³. Kepemimpinan jenis ini didasarkan pada identifikasi²⁴ psikologis seseorang dengan orang lain.

Kepemimpinan kharismatik didasarkan pada kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seseorang sebagai pribadi. Pengertian ini bersifat teologis, karena untuk mengidentifikasi daya tarik pribadi yang ada pada diri seseorang, harus menggunakan asumsi bahwa kemantapan dan kualitas kepribadian yang dimiliki adalah anugerah Tuhan. Weber mengidentifikasi sifat kepemimpinan ini dimiliki oleh mereka yang menjadi pemimpin keagamaan. Penampilan seseorang diidentifikasi sebagai kharismatik dapat diketahui dari ciri-ciri fisikalnya seperti matanya yang bercahaya, suaranya yang kuat, dagunya yang menonjol atau tanda-tanda yang lain.

Istilah kharismatik menunjuk kepada kualitas kepribadian, sehingga ia dibedakan dengan orang kebanyakan. Ia dianggap, bahkan diyakini, memiliki kekuatan supranatural, manusia serba istimewa. Kehadiran seseorang yang mempunyai tipe seperti itu dipandang sebagai seorang pemimpin, yang meskipun tanpa ada bantuan orang lain pun, ia akan mampu mencari dan menciptakan citra yang mendeskripsikan kekuatan dirinya. Sehubungan dengan ini Weber menyatakan:

*The term charisma will be applied to a certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supranatural, superhuman or at least specifically exceptional powers or qualities.*²⁵

Seringkali seseorang dianggap memiliki kharisma karena terdapat yang mempercayai bahwa ia mempunyai kekuatan dan kemampuan luar biasa dan mengesankan di hadapan masyarakat. Karenanya yang bersangkutan sering berpikir tentang sesuatu yang gaib, melakukan meditasi untuk mencari inspirasi sehingga membuatnya terpisah dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain. Meski demikian, seseorang yang berkharisma tidaklah mengharuskan semua karakteristik melekat utuh padanya. Baginya yang penting adalah sifat-sifat luar biasa yang dianggap orang lain sebagai atribut dari orang itu.

Para pengikut pemimpin kharismatik sering bersikap labil dan mudah berubah. Hingga batas tertentu mereka sangat loyal dan loyalitasnya nyaris mengabaikan kewajiban kerjanya dan menjual sesuatu untuk mengikuti anjuran pemimpinnya. Dengan demikian antara pemimpin

²¹ Sartono Kartodirjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), 7-9.

²² Franklin S. Haiman, *Leadership and Democratic Action* (Houghton: Mifflin Company, 1971), 228.

²³ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*. Ter. Talcott Parson (New York: The Free Press, 1966), 358.

²⁴ Identifikasi bermakna keterlibatan emosional seorang individu dengan individu lainnya. Bagi para pengikut, pemimpin adalah harapan untuk suatu kehidupan yang lebih baik dan dia dipandang sebagai pelindung dan – sekaligus—penyelamat.

²⁵ Weber, *The Theory of Social*, 358.

dan pengikut terkonstruksi hubungan erat, layaknya sebuah keluarga, dan hubungan demikian, juga terjalin di antara sesama pengikut dalam komunitas tersebut.

Hubungan tersebut merupakan bagian dari kewajiban moral pemimpin untuk membimbing para pengikutnya secara berkelanjutan, baik ketika diminta—ataupun tidak diminta—oleh komunitasnya. Pemimpin datang manakala menghadapi kesulitan. Dalam konteks ini, motivasi dan nasehat pemimpin diterima sebagai sesuatu yang mencerminkan mutu kepribadian yang luar biasa, yang—hingga batas tertentu— diyakini bersumber dari Tuhan, sehingga, dengan demikian, kepercayaan para pengikut terhadapnya semakin mengental, lantaran dianggap memiliki kemahiran mengetahui sesuatu yang terjadi pada diri pengikutnya.²⁶

Pemimpin kharismatik biasanya lahir ketika suasana masyarakat dalam kondisi kacau. Suasana seperti ini memerlukan pemecahan yang tuntas agar keadaan masyarakat kembali normal. Untuk itu memang diperlukan kehadiran figur yang dipandang sanggup menyelesaikan krisis tersebut. Dalam konteks demikian, tidak heran, bila proses kepemimpinan kharismatik hampir mendekati otoriter, kurang mengandalkan unsur musyawarah, rasional dan legal formal, meskipun bisa saja, ia berjiwa demokratis.

Kepemimpinan jenis ini banyak bercokol pada masyarakat tradisional. Jenis masyarakat seperti ini cenderung memiliki homogenitas tinggi, kepercayaan yang sama, pandangan hidup dan nilai budaya serta gaya hidup yang hampir sama pula. Homogenitas tersebut dapat menciptakan kesadaran kolektif, persamaan gaya hidup, hubungan langsung antar anggota masyarakat dan tidak adanya pembagian kerja yang impersonal.²⁷ Masyarakat dengan tipe demikian mudah disatukan oleh pengaruh yang bercorak kharismatis.

Jika pengikut telah terbiasa mengikuti pemimpin kharismanya, mereka menjadi tergantung kepada nasehat, bimbingan dan kemampuan pemimpinnya. Persoalannya adalah bagaimana mereka mengatasi kesulitan hidupnya manakala pemimpinnya mati atau tidak mampu lagi, bagaimana kualitas kepemimpinan itu dilestarikan, bagaimana cara mewarisi kualitas kharisma yang bersifat individualistik ke dalam struktur organisasi sosial yang lebih mapan, stabil dan berkesinambungan. Dengan kata lain, bagaimana menjadikan sumber kekuatan yang pada awalnya milik pribadi menjadi milik komunitas. Warisan kharismatik bagaimanapun mesti dilembagakan pada sistem aturan yang permanen dan stabil dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kharisma yang mulanya milik pribadi, pada akhirnya –dalam kondisi tertentu—dapat mengalami depersonalisasi dan pelembagaan.²⁸

Proses pengambil-alihan kharisma dari sumber utama ke rutinisasi kehidupan yang bersifat komunal ini, oleh Max Weber disebut sebagai rutinisasi kharisma. Hal ini dimaksudkan agar krisis kepemimpinan tidak berjalan lama. Gerakan ini muncul untuk membantu pulihnya kepemimpinan, sehingga *step by step* kestabilan dapat terjaga. Dalam proses memilih pengganti pemimpin, setidaknya-tidaknya calon pengganti, berupaya meyakinkan diri kepada anggota komunitas terhadap mutu kepribadiannya yang telah mewarisi sifat-sifat yang dimiliki pemimpin kharismatik sebelumnya.²⁹

Kedua, bentuk kepemimpinan terletak bukan pada diri kekuasaan individu, melainkan

²⁶ Di kalangan pengikut tarekat, kemampuan tersebut disebut dengan istilah *ma'rifat*.

²⁷ Doyle P. Johnson, *Teori-Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Ter. Robert M.J. Sewang (Jakarta: Gramedia, 1986), 81-82.

²⁸ Reinhard Bendix, *Max Weber; An Intellectual Portrait* (New York: Ancor Books, 1962), 308-311.

²⁹ Sehubungan dengan ciri khas kepemimpinan kharismatik ini, dalam perspektif Weber tidak cocok dengan gagasan rutinitas, bahkan dipandang sebagai ancaman bagi rutinitas dan tatanan yang mapan serta merupakan gangguan terhadap kepemimpinan dalam bentuk rasional mengingat kepemimpinan terakhir ini (rasional) lebih mendasarkan diri pada seperangkat aturan yang telah diundangkan secara resmi dan diakui sah keberlakuannya.

dalam jabatan atau status yang dipegang oleh individu. Dalam perspektif Weber, kekuasaan yang bersandar pada tata aturan disebut sebagai *legal authority*. Pola aturan normatif dan hak memerintah dari pemimpin yang terpilih berdasarkan pola aturan yang sah. Sehubungan dengan ini, Richard N. Osborn menyatakan "... *legal base would dominate since it concentrated on scientific rationality and efficiency. In the legal base, the authority figure dominates via legal procedure followers generally consider just*"³⁰

Otoritas legal diwujudkan dalam organisasi birokrasi. Tanggung jawab pemimpin dalam mengendalikan organisasi tidak ditentukan oleh penampilan kepribadian individu melainkan dari prosedur aturan yang telah disepakati. Unsur-unsur emosional dikesampingkan untuk kemudian digantikan dengan unsur yang rasional.

Ketiga, bentuk kepemimpinan tradisional, yang bersumber pada kepercayaan yang telah mapan terhadap kesakralan tradisi kuno. Kedudukan pemimpin ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam melaksanakan berbagai tradisi.

Krisis dan memudarnya Kharisma Kiai

Di atas telah dinyatakan bahwa eksistensi pemimpin kharismatik lebih banyak terjadi pada masyarakat tradisional, yang jauh dari rasionalitas serta terjadi karena suasana *chaos* yang memerlukan pemecahan secara cepat untuk mengembalikan keadaan menjadi stabil. Lalu bagaimanakah eksistensi kepemimpinan kharismatik tatkala masyarakat telah memasuki zaman modern.

Sehubungan dengan zaman modern, setidaknya terdapat dua ciri mendasar, *pertama*, semakin hilangnya pengaruh institusi agama, *kedua*, semakin tingginya supremasi rasionalitas sains. Dari kedua ciri mendasar tersebut, zaman modern lebih banyak berorientasi kepada komunalitas (orang banyak) ketimbang kelompok-kelompok tertentu. Negara berhasil menggeser peran institusi agama sebagai otoritas yang mengatur perjalanan budaya. Kekuasaan negara dan fungsi-fungsinya mengalami pertumbuhan yang pesat dan kepemimpinan pada zaman ini lebih menekankan pada corak kepemimpinan yang bercorak rasional.

Modernisasi menimbulkan globalisasi, sehingga disadari atau tidak, kemajuan yang ditimbulkannya secara meyakinkan mengubah dan mengarahkan kebudayaan manusia dan bahkan melebihi angan-angan manusia. Dalam konteks ini, Lucian W. Pye menyatakan bahwa modernitas adalah budaya dunia. Menurutnya, proses mondial ini tercipta karena kebudayaan modern senantiasa didasarkan kepada [1] teknologi yang maju dan semangat dunia ilmiah; [2] pandangan hidup yang rasional; [3] pendekatan sekuler dalam hubungan-hubungan sosial; [4] rasa keadilan sosial dalam masalah-masalah umum (*public affairs*), terutama dalam bidang politik dan [5] menerima keyakinan bahwa unit utama politik mesti berupa negara-negara kebangsaan³¹.

Pada taraf individual, manusia modern senantiasa memiliki sifat-sifat: kesiapan untuk menerima pengalaman-pengalaman baru dan keterbukaan kepada pembaharuan; kecenderungan untuk membentuk opini mengenai sejumlah masalah dan isu yang muncul tidak hanya di lingkungan dekat, tetapi juga di luarnya; orientasi di bidang opini lebih bercorak demokratis; lebih berorientasi pada masa kini dan masa depan daripada masa lampau; berpijak pada perencanaan dan organisasi dalam menangani kehidupan; efektif; menjunjung harkat diri

³⁰ Richard N. Osborn, et.al., *Organization Theory: Integrated Text and Case* (Florida: Robert E. Kriger Publishing Company, 1984), 245.

³¹ Lucian W. Pye, *Aspect of Political Development* (Boston: Little Brown, 1965), 8.

dan senantiasa memberikan penghargaan terhadap prestasi orang lain; berkeyakinan pada ilmu dan teknologi dan memegang teguh keyakinan terhadap keadilan distributif.³²

Berkaitan dengan kharisma, terbentuknya masyarakat modern sebagai akibat dari modernisasi dengan berbagai karakteristiknya tersebut, merupakan suatu tantangan —sekaligus ancaman—terhadap kharisma yang dimiliki oleh kiai. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat beberapa faktor makro yang mempengaruhi pudar bahkan hilangnya kharisma kiai³³.

Pertama, munculnya generasi muda santri yang berkarakter modern, dalam pengertian bahwa mereka mempunyai kemampuan dan kebebasan yang lebih besar untuk mengkaji dan mengevaluasi sikap kiai, paling tidak dalam wilayah politik. Perubahan seperti itu, jelas melahirkan masalah yang berkaitan dengan legitimasi peran kepemimpinan kiai. Kelahiran santri modern ini adalah hasil dari program modernisasi dalam sistem pendidikan pesantren yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah sekolah dalam lingkungannya.

Kedua, meningkatnya jumlah kelas menengah muslim yang lebih terdidik. Munculnya intelektual-intelektual muda, baik yang sekular maupun yang religius di kalangan NU³⁴ tidak hanya membuat posisi kiai sebagai legitimator menjadi tersaingi, tetapi juga membuat kredibilitas dan otoritasnya menjadi dipertanyakan. Situasi ini menunjukkan bahwa di pedesaan Jawa dan Madura dan juga di internal NU, sekarang ini orang-orang dapat pergi ke berbagai agen yang dapat memberikan kepada mereka pengetahuan tentang Islam dan kepemimpinan dalam pengertiannya yang lebih umum.

Ketiga, meluasnya wilayah operasi negara di balik peningkatan kualitas kehidupan umat Islam. Negara sangat peduli dengan problem ketidak-setaraan (*inequality*) dan ia terlibat dalam berbagai hal yang sebelumnya berada di bawah kepedulian kiai. Pengenalan upaya pengendalian angka kelahiran misalnya, telah melibatkan negara dalam pendefinisian arti sosial kelahiran, yang secara tradisional sebelumnya berada di bawah wilayah agama, dimana kiai memainkan peran penting di dalamnya.

Faktor-faktor di atas, tidak hanya melahirkan kalangan Islam muda yang kritis terhadap kepemimpinan kiai, tetapi juga memberikan alternatif mengenai adanya bentuk-bentuk kepemimpinan yang lain. Posisi kiai dan kepemimpinan kharismatiknya kemudian berubah secara tidak terelakkan, sehingga bukan merupakan suatu kebetulan misalnya, jika seorang kiai didemo oleh santri dan masyarakat sekitarnya.³⁵

Dalam kasus demikian, tampak jelas bahwa posisi kiai yang kharismatik dan sekaligus terhormat sudah goyah, dengan sebab yang tidak hanya bersumberkan pada perilaku kiai yang “kurang patut diteladani”, tetapi juga —hingga batas tertentu— karena adanya perubahan dalam norma sosial yang melandasi hubungan sosial di antara komunitas umat Islam.

³² Said Aqiel Siraj, “Khazanah Pemikiran Islam dan Peradaban Modern”, dalam Marzuki Wahid et.al., *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), 28.

³³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 3-4.

³⁴ NU merupakan organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1926. Para kyai organisasi ini biasanya dianggap sebagai Muslim tradisional ortodoks, yang berbeda dengan mereka yang biasa disebut Muslim modernis yang tergabung dalam organisasi seperti Muhammadiyah.

³⁵ Sebagaimana dinyatakan oleh Endang Turmudi dalam disertasinya, seorang kyai yang dia kenal baik, dituduh korupsi mengambil uang dari harta wakaf yang dikelolanya. Juga beberapa orang santri di pesantren Darul Ulum Jombang melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan kyai mereka mengenai pendidikan sekolah formal yang dimilikinya. Periksa Turmudi, *Perselingkuhan Kiai*, 4-5. Juga pengalaman penulis makalah ini ketika seorang khatib —yang waktu itu disampaikan oleh pengasuh suatu pondok pesantren—menyampaikan khutbah Idul Adha dengan topik yang melebar dan agitatif, sebagian jamaah shalat keluar dan pulang sebelum khutbah selesai. Fenomena demikian, hingga batas tertentu, jelas menunjukkan bahwa kharisma kyai sudah mulai memudar.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kepemimpinan kharismatik tokoh keagamaan Islam (kiai) terdapat pada masyarakat yang masih tradisional. *Kedua*, kepemimpinan kharismatik kiai pada masyarakat transisi –apalagi pada masyarakat modern dan masyarakat metropolis— telah mengalami krisis legitimasi, atau paling tidak, perubahan secara degradatif, karena berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi, baik yang bersifat internal pesantren maupun dinamika eksternal komunitas Muslim, dalam maknanya yang luas.

Dengan melihat perubahan status tersebut, sudah selayaknya, dalam dinamika kehidupan sosio-kultural yang dinamis ini, kiai, mau tidak mau [1] melakukan kaji ulang terhadap statusnya, yakni berusaha melakukan retrospeksi bahwa dirinya kini bukan satu-satunya institusi tempat masyarakat bertanya mengenai problem kehidupan, sebab kini telah tumbuh dan berkembang berbagai agen yang dapat menjawab berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat. [2] Pada sisi lain, kiai juga mesti menyadari bahwa perubahan sikap masyarakat terhadap lembaga keulamaan ini, merupakan akibat logis dari perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sehingga –suka atau tidak— mereka perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang berubah jika ingin kepemimpinannya terus diterima oleh umat Islam, meskipun tidak berada dalam aras kharismatik lagi. [3] Dengan fenomena demikian, sudah waktunya bagi kiai –dan calon-calon kiai— untuk melakukan reorientasi terhadap pola kepemimpinan yang diperankannya dari *religio-paternalistik* ke arah pola kepemimpinan *partisipatif persuasif*.³⁶ Pada sisi lain, sesuai dengan perubahan orientasi pola kepemimpinan, ikhtiar meningkatkan kualitas kepribadian dan wawasan intelektualitasnya, misalnya dengan melakukan studi lanjut (*post graduate*) di lembaga pendidikan formal, yang dengan bekal demikian, kiai menjadi lebih siap—dalam arti tidak gagap dan tidak mengalami *post power syndrome*— dalam melakukan reposisi fungsi sosialnya di tengah derasnya dinamika perubahan yang tidak lagi berpihak padanya untuk diperlakukan sebagai figur kharismatik lagi oleh komunitasnya.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES., 1987
- Anderson, Benedict ROG. *Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa* ter. Ali As'ad. Semarang: Menara Kudus, 1972.
- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasada Press, 1993.
- Bendix, Reinhard. *Max Weber; An Intellectual Portrait*. New York: Ancor Books, 1962.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Haiman, Franklin S. *Leadership and Democratic Action*. Houghton: Mifflin Company, 1971.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Ter. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. Jakarta: P3M., 1987.

³⁶ Istilah ini dipinjam dari disertasi Imron Arifin dalam disertasinya. Model kepemimpinan *religio-paternalistik* adalah model kepemimpinan pada masyarakat agraris tradisional yang mengandaikan seorang kiai sebagai figur sentral.

- Johnson, Doyle P. *Teori-Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Ter. Robert M.J. sewang. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kartodirjo, Sartono. *Religious Movement of Java in the 19th and 20th Centuries*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1970.
- . *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Moebirman, *Keris and Other Weapons of Indonesia*. Jakarta: Martinus Nitjhof, 1970.
- Osborn, Richard N. et.al. *Organization Theory: Integrated Text and Case*. Florida: Robert E. Kriger Publishing Company, 1984.
- Paul B. Horton Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Ter. Aminuddin Ram, Tita Sobari. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Pradjarta Dirdjosanjoto. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Pye, Lucian W. *Aspect of Political Developmen*. Boston: Little Brown, 1965.
- Rahardjo, M. Dawam. ed. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Sudjito S. *Transformasi Sosial menuju Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Sukamto. *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES., 1999.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*. Ter. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Ter. Talcott Parson. New York: The Free Press, 1966.
- Wahid, Marzuki. et.al. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam perubahan Sosial*. Jakarta: P3M., 1986.